DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Ahmad Tanzeh. (2004). *Metode Penelitian Prakti*s. Jakarta: PT Bima Ilmu.

Ahmad Tanzeh. (2010). *Dasar-Dasar Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Adiyanta, F.C. S. (2018). Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). *Administrative Law & Governance Journal, 1*(1), 62-78.

Apriani, W. Suprijanto, A. & Pranaditya, A. (2017). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016.* Ekonomi Akuntansi.

Asih, W. W. (2009). *pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (UP3AD) kabupaten pemalang*. universitas diponegoro. semarang.

Citra Umbaran. (2004). *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Bandung.

Darmayanti, T. W. (2004). Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, X*(1). 100-109.

Gunawan, A & Sukartha, M. I. (2016). Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 17*(3). 2036-2060.

Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Perspektif Ekonomi*. Jakarta. Integritas Dinamika Press.

Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak. *Dalam Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3*(1), 126-142.

Usaini, A. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Jurnal Profit, 14*(2). 48-55.

Husaini Usman (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hz, P. E. (2017). *Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012-2016*, Bandar Lampung: Bapenda.

Ibnu Syamsi (1994), Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen. Jakarta; Rineka Cipta.

Irawan Soehartono. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya Pendekatan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Karina, N. & Budiarsa, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA, 4*(1), 715-722.

Lexi J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro,

Marihot P. Siahaan. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta; PT Raja Grafindo.

Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Offset.

Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi, XIX*(2). 225-241.

Nuryamin. (2016). *Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makassar*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Seminar Nasional & Call For Paper, Feb Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global"* Malang, Universitas Muhammadiyah. Malang.

Patabang, L., Fitriana, R., & Weldy, Y. (2019). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Samarinda). *Jurnal Eksis, 15*(2), 89-97.

Pangkey, M. M. Sondakh, J. J. & Tirayoh, Z. V. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12*(2). 513-522..

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara, 1*(1). 15-30.

Rahmani, S. S. (2008). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattulah Jakarta.

Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat.

Rompis, N. E. Ilat, V. & Wangkar, A. (2015), Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah, 15*(2), 51-62.

Safri Nurmantu. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta*: Granit.

Saifuddin Azwar. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

Sari, S. (2017). Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara. *Journal Of Applied Business And Economics, 3*(3). 139-147.

Sony Defano & Siti Rahayu. (2006). *Perpajakan , Konsep, Teori, ,dan Isu*. Jakarta; kencana

Sutinah & Suyanto Bagong. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Suharsimi Arikanto. (2005). *Menejemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. (2012). *Motede Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto. Intansari, P. P. L. A. & Endahjati, S. (2016), Tax Amnesty. *Jurnal Akutansi*, 4(2). 9-22.

Sari, P. D. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada Kpp Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen, 1*(1). 1-32.

Setiawan, F. (2018). Analisis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Universitas Mulawarman.

Setyabudi, M. S. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan PPH Final (Implementasi PP Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta*. Tesis publikasi. universitas muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Sorongan, V. V. (2015). Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut. *Jurnal EMBA, 3*(4), 325-334.

Suwarno, A. E., & Suhartiningsih. (2008). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7*(2), 162-173.

Tresnawati, R. & Putri, E. A. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 9*(2), 73-80.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 1.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

Ulfanur, M. (2017). Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 11*(2), 1-18.

W Gulo. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Danbea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 70-79

Widjaja, A. W. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.

Widihartanto, S. & Widiatmanti, H. (2016). Tax Amnesty Dan Faktor Penentu Keberhasilannya: Pelajaran Dari Beberapa Otoritas Pajak. *DDC Working Paper*, *14*(16). 1-12

Yusuf Qardhawi, (1999). Fiqh Az-Zakah, (Muassasat Ar-Risalah: Beirut, Libanon, 1973), Terj. Oleh Salman Harun (Jilid I), Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin (Jilid II), Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa,

Yulies Tiena Masriani (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Zainal Arifin. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

L A M P I R A N

INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PEMUTIHAN PAJAK DAN KETERKAITANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS KANTOR SAMSAT AIMAS KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT)

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati kondisi kantor samsat aimas kabupaten sorong.
   a. Kondisi fisik: gedung kantor samsat aimas kabupaten sorong, sarana dan prasarana.
   b. Kondisi non fisik: struktur organisasi, kepala, sekretaris dan lain sebagainya.

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Mengambil data dan sejarah berdirinya kantor samsat aimas.
2. Mengambil data struktur organisasi kantor samsat aimas.
3. Mengambil data jumlah pegawai dan pewajib pajak samsat aimas.
4. Mencatat sarana dan prasarana samsat aimas
5. Mengamati proses kegiatan pembayaran pajak kantor samsat aimas.

C. PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai dan pewajib pajak diKantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong.

a. Kepala samsat aimas kabupaten sorong
   1. Sejak kapan kantor samsat aimas didirikan?
   2. Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi kepala samsat aimas?
   3. Bagaimana proses pelayanan yang dilakukan di kantor samsat aimas?
   4. Bagaimana sistem kepemimpinan selama menjadi kepala samsat aimas?

5. Bagaimana proses pengawasan dan serta evaluasi yang dilakukan di kantor samsat aimas?
6. Kebijakan apa yang diambil oleh bapak ketika banyak pewajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak?
7. Bagaimana proses penetapan penghapusan denda pajak di kantor samsat aimas?
8. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak meningkat terhadap kesadaran pewajib pajak?
9. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak berjalan efektif terhadap pendapatan asli daerah?
10. Apakah meningkat pendapatan asli daerah tahun 2017 S/D 2020 setelah diterapkannya penghapusan denda pajak ?

b. Pegawai Samsat Aimas

1. Sudah berapa lama anda bekerja di kantor samsat aimas?
2. Apakah dalam proses pelayanan ada pewajib pajak yang komplen?
3. Apa yang di maksud pajak menurut anda?
4. Bagaimana proses pelayanan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan di kantor samsat aimas?
5. Bagaimana proses penetapan penghapusan denda pajak di kantor samsat aimas?
6. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak meningkat terhadap kesadaran pewajib pajak?
7. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak berjalan efektif terhadap pendapatan asli daerah?

8. Apakah meningkat pendapatan asli daerah tahun 2017 S/D 2020 setelah diterapkannya penghapusan denda pajak ?

c. Pewajib Pajak Samsat Aimas

1. Apa yang di maksud pajak menurut anda?
2. Sudah berapa lama menjadi pewajib pajak?
3. Apa yang dirasakan selama menjadi pewajib pajak?
4. Bagaimana perkembangan samsat aimas menurut anda?
5. Apa kendala selama menjadi pewajib pajak di samsat aimas?
6. Apakah anda menunggak atau tidak menunggak pajak?
7. Apa yang menjadi perkerjaan anda sehingga tidak taat wajib pajak?
8. apakah ada kebutahan yang paling utama selain pembayaran pajak?

CATATAN OBSERVASI

Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2021

Waktu : 08:15-10-30 Wita

Tempat : Pelayanan Pajak

Kegiatan : Mengamati Kegiatan Pelayanan Pajak Di Kantor Samsat Aimas

Deskripsi :

Pengamatan yang dilakukan penulis dibagian pelayanan pajak. Setiap harinya mengalami peningkatan yang secara signifikan dalam kewajiban wajib pajak sehingga setiap harinya yang datang membayar pajak manjadi 60 sampai dengan 70 orang. Disini dapat terlihat kesadaran wajib pajak ketika pemerintah mengadakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dikelola sebaik mungkin oleh pemerintah daerah khususnya di kantor samsat aimas. Dalam hal pengurusan di kantor samsat aimas yang bertempat di kabupaten aimas telah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Karena jumlah pewajib pajak tiap harinya mengalami peningkatan yang secara signifikan, namun petugas fiskus yang berada di kantor samsat hanya berjumlah sebelas orang sehingga kualahan dengan melayani para pewajib pajak yang setiap harinnya mengalami peningkatan.

Keefektifan pelayanan pajak di kantor samsat sekalipun mengalami peningkatan yang singnifikan akan kesadaran wajib pajak setelah di belakukannya pemutihan denda pajak, namun bisa di atasi oleh pegawai

samsat aimas seefesien mungkin. Pegawai kantor samsat aimas berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan pekayanan prima.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
Kepala UPT SAMSAT Aimas La Ode Ma'awi, SE, M.M,	1. Sejak kapan kantor samsat aimas didirikan?	2013
	2. Sudah berapa lama menjabat sebagai kepala samsat aimas?	Awalnya saya menjabat di kantor samsat kota selama 9 tahun, sedangkan di samsat aimas selama 5 tahun
	3. Bagaimana sistem kepemimpinan selama menjadi kepala samsat aimas?	Mempertanggung jawabkan semua penerimaan pajak dan mengatur semua tata kelola di kantor
	4. Bagaimana proses pelayanan yang dilakukan di kantor samsat aimas?	Kami mengedepankan etika dan kami sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan prima
	5. Bagaimana proses pengawasan serta evalusasi yang dilakukan di kantor samsat aimas?	proses pengawasan di kantor samsat mengawasi penerimaan, melaporkan dan evaluasi yang kami lakukan yaitu memberikan edukasi dalam memahami pajak agar berkurangnya tunggakan pajak
	6. Kebijakan apa yang diambil oleh bapak ketika banyak pewajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak?	Kami hanya melaporkan jumlah tunggakan dan seterusnya melalui rapat pemutusan pemberlakuan penghapusan denda pajak
	7. Bagaimana proses penetapan penghapusan denda pajak di kantor samsat aimas?	Proses penetapan penghapusan denda bajak disebabkan karena banyaknya pewajib pajak yang tidak taat atau menunggak pajak dan

		untuk mengejar target penerimaan tahunan pajak
	8. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak meningkat terhadap kesadaran wajib pajak?	Jelas, setelah diberlakukan penghapusan denda pajak pasti meninggkat karena selain mengurangi beban tahunan juga wajib pajak hanya menbayar pokoknya saja
	9. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak berjalan efektif terhadap pendapatan asli daerah?	Sudah pasti efektif karena banyaknya jumlah kesadaran wajib pajak pasti berpengaruh sama pendapatan asli daerah setelah dibelakukan pemutihan denda pajak
	10. Apakah meningkat penerimaan pajak tahun 2017 s/d 2020 setelah diterapkannya pengapusan denda pajak?	Kami bersyukur, setiap tahunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan malampui batas target yang ditetapkan tiap tahunnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
Pegawai SAMSAT Aimas Luther T. Pakiding, S.Sos	1. Sudah berapa lama bapak bekerja di samsat aimas?	Untuk bekerja di samsat aimas dari awal berdirinya kantor, 9 tahun sampai tahun ini
	2. Apa yang di maksud pajak menurut bapak?	Pajak adalah iuran wajib dan imbalannya tidak secara langsung di terima wajib pajak
	3. Bagaimana proses pelayanan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan di kantor samsat aimas?	Untuk pelayanan kami mengedepankan etika sedangkan evaluasi ya, kita malakukan sosialisasi kepada masyarkat tentang pajak
	4. Apakah dalam proses pelayanan ada pewajib pajak yang komplen?	Klau untuk yang komplen dari 100 pasti ada 2 sampa 3 orang, ya, komplennya hanya pada perselisihan perhitungan jumlah pokok setelah diberlakukan pemutihan denda pajak
	5. Bagaimana proses penetapan penghapusan denda pajak di kantor samsat aimas?	Proses penetapan penghapusann denda pajak yaitu atas keputusan pimpinan sesuai dengan peraturan SK gubernur
	6. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak meningkat terhadap kesadaran wajib pajak?	Jelas meningkat, yang tadi jumlah pembayarannya terhitung pokok dengan denda pajak,

		tetapi pada saat diberlakukan pemutihan denda pajak pokoknya saja yang dibayar
	7. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak berjalan efektif terhadap pendapan asli daerah?	Jelas berjalan efektif terhadap pendapatan asli daerah, apalagi melampaui target tahun justru tambah lebih baik bagi pendapatan asli daerah
	8. Apakah meningkat pendapatan asli daerah tahun 2017 s/d 2020 setelah diterapkannya pengapusan denda pajak?	Yah, untuk penerimaan tahunan mengalami peningkatan yang sangat penting setelah diberlakukannya penghapusan denda pajak.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
Pewajib Pajak Nikolas Jitmau	1. Apa yang di maksud pajak menurut bapak?	Pajak kan kewajiban saya yang memiliki kendaraan bermotor, untuk defenisi umum saya tidak tau
	2. Sudah berapa lama menjadi pewajib pajak?	Motor saya belinya tahun 2011, klau terhitung dengan tahun ini sudah kurang lebih 11 tahun
	3. Apa yang dirasakan selama menjadi wajib pajak?	Ya selama menjadi wajib pajak melihat pembangunan aimas terutama jalanannya bagus semua itu semua berkat kami juga taat akan wajib pajak
	4. Bagaimana perkembangan samsat aimas menurut bapak?	Klau untuk pelayanan semakin bagus, ramah, baik dan sopan santun. untuk waktu pengurusan semoga bisa ditingkatkan lagi
	5. Apa yang menjadi kendala selama menjadi pewajib pajak?	Karna saya PNS, untuk waktu saya sangat sedikit, sehingga saya sering telat dalam menbayar pajak
	6. Apakah bapak menunggak pajak atau tidak menunggak pajak?	Menunggak karna kesibukan
	7. Apa yang menjadi pekerjaan bapak sehingga tidak taat wajib pajak?	Saya, mengajar sebagai guru di SMA 1 Aimas
	8. Apakah ada kebutuhan yang paling utama selain	Klau untuk kebutuhan utama

	pembayaran pajak?	sangat banyak, apalagi setiap bulannya gaji saya kadang habis untuk menutupi kebutuhan utama

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

PEDOMAN FOCUS GROUP DISCUSSION

Pedoman pertanyaan-pertanyaan dalam Focus Group Discussion:

1. Apakah saja fasilitas dikantor samsat aimas?
2. Apa yang anda pahami tentang pajak kendaraan bermotor?
3. Untuk apakah pajak kendaraan bermotor dialokasikan?
4. Bagaimanakan pegawai samsat aimas mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor?
5. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah apabila banyak tunggakan wajib pajak?
6. Dalam pemberlakuan pemutihan denda pajak apakah mengalami peningkatan kesadaran dalam wajib pajak?

TRANSKRIP FOCUS GROUP DISCUSSION

Tanggal : 13 September 2021

Waktu : 16:00 - Selasai WITA

Tempat :Ruang Rapat 1

NO	NAMA	JABATAN
1	La Ode Ma'awi, SE, M.M.	Kepala UPT SAMSAT Aimas
2	Esterina Basna, SE.	Kasubag Tata Usaha
3	Luther T. Pakiding, S.Sos	Kasie Pendataan Dan Penataan
4	Moch. Samsoel Hoeda, S.Sos	Kasie Penagihan Dan Laporan

1. Apakah saja fasilitas dikantor samsat aimas?

RESPONDEN	PERNYATAAN
3	Kami memiliki fasilitas, wifi 5 unit. Ac 14 buah, computer aktif 11 buah dan computer cadangan 6 buah, CCTV sebagai keamanan sebanyak 8 unit
4	Kami memiliki mesin pencetak plat nomor kendaraan bermotor sebanyak 2 unit, alat cetak STNK sebanyak 4 cetak
1	Fasilitas yang tersedia di kantor samsat aimas semua itu diperuntukan untuk keamanan dan kenyamanan baik petugas maupun wajib pajak

2. Apa yang anda pahami tentang pajak kendaraan bermotor?

RESPONDEN	PERNYATAAN
1	Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib tahunan bagi masyarakat yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor
2	Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor setiap tahunnya harus terpenuhi demi pembangunan yang berkelanjutan
3	Pajak adalah iuran wajib yang harus di penuhi tetapi secara interprestasi tidak secara langsung dan penerimaan digunakan unuk pembangunan jalan atau memelihara jalan
4	Pajak adalah kewajiban setiap masyarakat yang memiliki kendaraa bermotor.

3. Untuk apakah pajak kendaraan bermotor dialokasikan?

RESPONDEN	PERNYATAAN
1	Pengalokasian penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan transportasi
2	Penerimaan pajak kendaraan bermotor di alokasi untuk belanja kebutuhan suatu daerah termasuk pembangunan yang berkelanjutan

4. Bagaimanakah pegawai samsat aimas mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor?

RESPONDEN	PERNYATAAN
3	Kami hanya mendata jumlah penerimaan dan setelah itu melaporkan kepimpinan
4	Kami memberikan surat penagihan kepada wajib pajak yang menunggak
1	Urusan pengalokasian penerimaan pajak tergantung pada pemerintah pusat yang mengatur kami bertugas hanya sebagai, mendata, menagih dan melaporkan

5. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah apabila banyak tunggakan wajib pajak?

RESPONDEN	PERNYATAAN
1	Pemerintah daerah dalam menanggapi banyaknya jumlah tunggakan pajak kendaraan salah satunya memberikan pemutihan denda pajak kepada wajib pajak yang menunggak untuk meminalisir jumlah tunggakan tahunan. Data tunggakan itu semua melalui pendataan dari kantor samsat aimas setalah itu melaporkan kepada pemerintah pusat

6. Dalam pemberlakuan pemutihan denda pajak apakah mengalami peningkatan kesadaran dalam wajib pajak?

RESPONDEN	PERNYATAAN
1	Iya pasti, terlihat dari jumlah penerimaan tahunan yang setiap tahunan meningkat
4	Dari jumlah penagihan yang menunggak semakin menurun setiap tahunnya dari hasil
3	Setiap tahunnya apabila diberlakukan pemutihan denda pajak jumlah wajib pajak meningkat, tidak seperti hari sebelum diterpkannya pemutihan denda pajak. Sampai sampai kami sebagai petugas

	fiskus kualahan melayani pewajib pajak yang melonjak setiap tahunnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

DOKUMENTASI

Gedung Kantor Samsat Aimas Aimas Kabupaten Sorong

Wajib Pajak Mengantri Membayar Pajak

Petugas Fiskus Memberikan Pelayanan Pajak Di Kantor Samsat Aimas

Loket Pelayanan Pajak Tahunan Dikantor Samsat Aimas

Ruang Pembuatan Plat Kendaraan Bermotor

Ruang Pelayanan BPKB Kantor Samsat Aimas

Wawancara Kepala UPT Samsat Aimas

Wawancara Pewajib Pajak

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
PASCASARJANA
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401-3193710).
E-Mail. pascasarjana.iainkendari@gmail.com. Website. iain-kendari.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0062/In.23/P/PP.00.9/03/2021

Tentang

PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA IAIN KENDARI TAHUN 2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari :

Membaca : Surat Permohonan Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tanggal, 21 Februari 2021:
Nama/NIM : Laode Rajamin / 19040204011
Judul Tesis : "*Analisis Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) terhadap Pemberlakuan Penghapusan Denda Pajak (PDP) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 S/D 2019 (Studi Kasus di Kantor Samsat Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat)* ".

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 9 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor. 02 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN KENDARI TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN KENDARI TAHUN 2021.

Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Sdra. Laode Rajamin sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Hasan Aedy, M.S
Pembimbing II : Dr. Wahyudin Maguni, SE, M.Si

Kedua : Biaya Pembimbing Tesis dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Kendari Tahun 2021.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan didalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 01 Maret 2021

Direktur,

Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd
NIP. 197608202003121003

Tembusan, Yth:
1. Rektor IAIN Kendari;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Prodi ESy;
4. Dosen Pembimbing I dan II;
5. Kasubbag. TU. Pascasarjana;
6. Mahasiswa Ybs;
7. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT / SAMSAT AIMAS
Jln. Mariat.2, Kab. Sorong

SURAT KETERANGAN
Nomor: 32/13/SAMSATAIMAS/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT / SAMSAT Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat, menerangkan bahwa mahasiswa program studi magister ekonomi syariah pascasarjana IAIN Kendari:

Nama : La Ode Rajamin
NIM : 19040204011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Mariat. 2, Kab. Sorong

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 19 Juli 2021 S/D 24 September 2021 di Kantor SAMSAT Aimas untuk menyusun tesis dengan judul: **"***Analisis Pemutihan Denda Pajak Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Dan keterkaitannya Dengan pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aimas, 24 September 2021
Kepala UPT SAMSAT Aimas

La Ode Ma'awi, SE, M.M

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: La Ode Rajamin
NIM	: 19040204011
Tempat Dan Tanggal Lahir	: Jayapura, 11 November 1
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Pongo 1. Pongo Wangi-Wangi
Nomor Handphone	: 082355042229
E-mail	: Rajaminlaode@gmail.com
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pengalaman Penelitian	: Penelitian Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri 2019 tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kecurangan Harga Jual Beras Rojo Lele Dan Ketupat sama Kualitas (Studi Kasus Di Pasar Baruga Kota Kendari).
Pengalaman Pubilkasi	: Belum Pernah

B. DATA KELUARGA

Nama Bapak	: La Ode Ma'awi, SE, M.M
Nama Ibu	: Wa Ode Rahimin
Nama Saudara	: 1. La Ode Arwin

2. La Ode Fitrahdiansyah, S.Pd
3. Wa Ode Rahma Fia

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Inpres 49 Malawei	: 2007-2008
PPS Darul Hikmah	: 2010-2011
SMA Negeri 1 Kota Sorong	: 2013-2014
S-1 IAIN Kendari	: 2015-2019
S-2 IAIN Kendari	: 2019-2021